

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF REGIONAL GOVERNMENT BUDGET TANAH DATAR

Suci Defiana Ruffit dan Desmiwerita

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti

Jl. Veteran Dalam No.26B, Padang,

Email : sucidefianaruffit@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Tanah Datar. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam proses perumusan strategis suatu organisasi. Dan penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ; kinerja keuangan yang diwakili oleh analisis varians untuk pendapatan dan belanja dapat dikatakan baik. Kemudian kinerja pengelolaan APBD dilihat dari Analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja dikategorikan pertumbuhannya positif. Dan kinerja APBD jika dilihat dari Analisis Rasio Keuangan menunjukkan hasil bahwa derajat desentralisasi pada Kabupaten ini sangat kurang dan perlu perhatian khusus, karena angka derajat desentralisasi yang sangat rendah sehingga kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, otomatis rasio kemandirian daerahnya juga rendah. Sedangkan dalam hal Rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan efektif. Dalam hal Rasio keserasian belanja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar lebih besar mengalokasikan belanjanya untuk belanja operasi. Disimpulkan secara keseluruhan kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2010 - 2014 masih belum cukup baik. Untuk itu Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar hendaknya berusaha mencapai target pendapatan sehingga derajat desentralisasi dan kemandirian daerah bisa lebih baik.

Kata Kunci : Kinerja, Anggaran, Pendapatan dan Belanja

Abstract

The purpose of this study is to assess the performance of regional government budget management in tregency of Tanah Datar . Performance is an overview of the level of achievement of an implementation of an activity or policy in realizing the goals, objectives, visions, ans missions of the organization which are contained in the strategic formulation of an organization. And performance assessing is a management tool for increasing the quality. The analysis result show that : financial performance represented by varians analysis for revenue and expenditure can be said to be good. Then the budget management performance seen from analysis of revenue growth and expenditure growth is considered positive. And the performance of the budget when seen from Financial Ratio Analysis showed the result that the degree of decentralization in this district is very less and need special attention, because the number of degrees of decentralization so low that the ability of the region in the implementation of regional autonomy is highly dependent on the transfer of funds from the center, automatic independence ratio regions too low. While in terms of effectiveness ratio of local taxes can be categorized Tanah Datar effective. In terms of compatibility ratio of local government spending Tanah Datar greater spending allocated to operating expenditures.. Concluded the overall performance of the management of Tanah Datar District Budget for Fiscal Year 2010 - 2014 is still not good enough. For the Government of Tanah Datar regency should seek to achieve revenue targer that the degree of decentralization and regional autonomy could be better.

Key Word : Performance, Budget, Income and Expenditure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah salah satunya berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Dalam pelaksanaan perekonomian daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu.

Dari beberapa jurnal yang penulis baca, beberapa daerah masih sangat bergantung pada pihak eksternal karena kemandirian daerahnya cukup rendah dan pemerintah daerah kurang mengoptimalkan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor yang seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Tanah dengan judul "**Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar**".

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah yaitu "bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanjadaerah Kabupaten Tanah Datar?"

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Keuangan Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Bagi akademis, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kinerja pengelolaan APBD dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukanajian terhadap kinerja pengelolaan APBD.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bastian (2006:273), “Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak. Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam 3(tiga) bagian yaitu (Mahmudi, 2007):

Analisis Kinerja Pendapatan

1 Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pend. tahun } t}{\text{Anggaran Pend. Tahun } t} \times 100\%$$

2 Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran,

$$\text{Pert. Pend. Tahun } t = \frac{\text{Pend. Tahun } t - \text{Pend. Tahun } (t - 1)}{\text{Pend. Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

3 Analisis Rasio Keuangan

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Pinjaman}} \times 100\%$$

c) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

1 Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja.tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif.

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi } th \ t - \text{Realisas Th } (t - 1)}{\text{Pend. Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

3 Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang di alokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Terdapat dua buah analisis keserasian belanja, yakni:

1. Analisis Total Belanja Modal dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja, rumusnya :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja, rumusnya :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4 Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat *absolute*, tetapi *relative*.

Berikut rumus untuk menghitung persentase dari rasio efisiensi belanja :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode *library research* merupakan teknik pengumpulan data dengan riset pustaka yang memanfaatkan teori – teoridan pendapat para tokoh dalam buku ilmiah, majalah, artikel dan bacaan – bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen yang berkaitan

dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Didalam melaksanakan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda – benda tertulis seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Datar.

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya yang berupa data runtut waktu (*time series*) yaitu APBD dan laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD

Analisis Kinerja Pendapatan

Dengan menggunakan data APBD dan realisasi APBD, dilakukan analisis pendapatan dengan menggunakan analisis :

1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan. Kinerja pendapatan dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal ini dinilai kurang baik. Adapun selisih antara realisasi dan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Analisis Varians Pendapatan tahun 2010-2014
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010 – 2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians/ Selisih	Persentase	Kinerja
2010	563.194.946.162	562.315.338.339	(879.607.823)	99,84 %	Kurang Baik
2011	677.492.093.812	670.664.870.823	(6.827.222.989)	98,99 %	Kurang Baik
2012	759.861.949.351	760.003.786.355	141.837.004	100,02 %	Kurang Baik
2013	89 5.079.668.604	893.108.389.961	(1.971.278.643)	99,78 %	Kurang Baik
2014	1.004.767.570.838	1.004.720.140.166	(47.430.672)	99,995 %	Kurang Baik

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja pendapatan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu. Adapun hasil dari perhitungan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010 – 2014

Tahun	Pendapatan Tahun t	Pendapatan Tahun t-1	Selisih	Pertumbuhan Pendapatan (%)
2010	562.315.338.339	539.003.502.268	23.311.836.071	4,32%
2011	670.664.870.823	562.315.338.339	108.349.532.484	19,27 %
2012	760.003.786.355	670.664.870.823	89.338.915.532	13,32 %
2013	893.108.389.961	760.003.786.355	133.104.603.606	17,,51%
2014	1.004.720.140.166	893.108.389.961	111.611.750.205	12,,50 %
Rata-Rata				13,39 %

3. Analisis Rasio Keuangan

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraa desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Adapun hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010 – 2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan Daerah
2010	36.843.263.540	562315338.339	6,55%	Sangat Kurang
2011	51.552.513.043	670.664.870.823	7,69%	Sangat Kurang
2012	53.691.047.586	760.003.786.355	7,06%	Sangat Kurang
2013	63.835.093.787	893.108.389.961	7,15 %	Sangat Kurang
2014	99.694.236.048	1.004.720.140.166	9,92%	Sangat Kurang
Rata-Rata			7,67%	Sangat Kurang

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 4.4 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010 – 2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2010	36.843.263.540	522.015372.294	7,06%	Instruktif
2011	51.552.513.043	619.060.074.170	8,33 %	Instruktif
2012	53.691.047.586	706.009.114.630	7,60%	Instruktif
2013	63.835.093.787	827 .812.535.625	7,71 %	Instruktif
2014	99 .694.23 6.048	903.513.077.359	11,03 %	Instruktif
Rata-Rata			8,35 %	Instruktif

c) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100. Adapun hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010 – 2014

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas	Efektivitas Pajak Daerah
	Rencana	Realisasi		
2010	3.923.500.000	4.633.265.516	118,09 %	Sangat Efektif
2011	5.108.456.519	5.438.175.197	106,45 %	Sangat Efektif
2012	6.084.743.180	7.293.770235	119,87 %	Sangat Efektif
2013	8.774.156.646	8.174.666218	93,17 %	Sangat Efektif
2014	12.187.541.466	9.458.236.048	77,61 %	Sangat Efektif
Rata-Rata			103,04 %	Sangat Efektif

Analisis Kinerja Belanja

Dengan menggunakan data APBD dan realisasi APBD, dilakukan analisis pendapatan dengan menggunakan analisis :

1. Analisis Variasi (selisih) Belanja

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran.. Adapun selisih antara realisasi dan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Analisis Variasi (Selisih) Belanja

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010 – 2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Variasi/ Selisih	Persentase	Kinerja
2010	629.433.266.947	568.631.590.454	(60.801.676.493)	90,34%	Baik
2011	734.107.271.661	661.905.541.057	(72.201.730.604)	90,16%	Baik
2012	809.818.357.565	730.081.469.003	(79.736.888.562)	90,15%	Baik
2013	959.840.142.571	856.376.208.799	(103.463.933.772)	89,22%	Baik
2014	1.087.354.767.167	971.007.739.987	(116.347.027.180)	89,30%	Baik

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja negara dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Untuk melihat pertumbuhan yang terjadi, maka harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian selisih dari perubahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk persentase. Adapun hasil dari perhitungan pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Analisis Pertumbuhan Belanja

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010 – 2014

Tahun	Belanja Tahun t	Belanja Tahun t-1	Selisih	Pertumbuhan Belanja (%)
2010	568.631.590.454	556.304.350.976	12.327.239.478	2,22%
2011	661.905.541.057	568.631.590.454	93.273.950.603	16,40%
2012	730.081.469.003	661.905.541.057	68.175.927.946	10,30%
2013	856.316.208.199	730.081.469.003	126.294.739.796	17,30%
2014	971.007.739.987	856.316.208.199	114.631.531.188	13,39%
Rata – Rata				11,92%,

3. Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan (langsung) dan belanja rutin (tidak langsung) secara optimal. Adapun hasil dari perhitungan pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Analisis Keserasian Belanja APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010-2014

Tahun	Total Belanja	Belanja Modal	Belanja Operasional	Rasio Belanja Modal	Rasio Belanja Operasional
2010	568.631.590.454	36.425.615.524	530.119.885.148	6,41%	93,23%
2011	661.905.541.051	77.789.333.425	572.147.991.345	11,75 %	86,44%
2012	730.081.469.003	86.485.201.226	618.271.478.434	11,85 %	84,69%
2013	856.376208.799	128.063.358.873	691.398.921.624	14,95 %	81,44%
2014	971.007.739.987	123.046.706.609	808.384.032.897	12,67 %	83,25%
Rata-Rata				11,53 %	85,81%

4. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat *absolute*, tetapi *relative* daerah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Adapun hasil dari perhitungan pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2010-2014 adalah seb. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah agak berikut:

Tabel 4.9 Analisis Efisiensi Belanja APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 2010-2014

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi
2010	629.433.266.947	568.631.590.454	90,34%
2011	734.107.271.661	661.905.541.057	90,16 %
2012	809.818357.565	730.081.469.003	90,15 %
2013	959.840.142.571	856.376208.799	89,22%
2014	1.087.354.767.167	971.007.739.987	89,30%
Rata-Rata			89,84%

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap Laporan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2014 dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil dari analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan realisasinya pada Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2010- 2014 menggunakan analisis varians yaitu :
 - a. Kinerja pendapatan pemerintah daerah dilihat dari analisis varians secara umum sudah dikatakan baik
 - b. Kinerja belanja pemerintah daerah dilihat dari analisis varians secara umum sudah dikatakan baik
2. Hasil dari analisis kinerja pengelolaan APBD pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2010 – 2014 dengan menggunakan analisis pertumbuhan yaitu :
 - a. Analisis pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkat dari tahun sebelumnya.
 - b. Analisis pertumbuhan belanja dikategorikan positif, pertumbuhan belanja ini bisa di akibatkan karena adanya penyesuaian dengan inflansi dan perubahan nilai tukar rupiah.
3. Hasil dari analisis kinerja pengelolaan APBD pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2010 – 2014 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio desentralisasi, rasio kemandirian dan efektifitas pajak daerah, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi belanja yaitu :
 - a. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tanah Datar masih sangat kurang
 - b. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar termasuk rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan.

- c. Rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan.
 - d. Rasio keserasian belanja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan rasio belanja modal dan rasio belanja operasi, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar lebih besar mengalokasikan belanjanya untuk belanja operasi.
 - e. Rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Tanah Datar sudah sangat baik/efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.
4. Hasil dari pengujian hipotesis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2014 yaitu :
- a. Hipotesis untuk anggaran dan realisasi pendapatan dapat diterima dengan derajat kesalahan (α) = 5 %.
 - b. Hipotesis untuk anggaran dan realisasi belanja ditolak dengan derajat kesalahan (α) = 5 %.

Saran

Agar kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya maka penulis menyampaikan beberapa hal untuk menjadi saran yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar agar dapat memaksimalkan semua sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah agar dapat memenuhi semua kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar seharusnya dapat meningkatkan investasi untuk keuntungan di masa yang akan datang.
3. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tetap meningkatkan realisasi belanjanya dalam hal efektifitas pengelolaan pajak daerah dan efisiensi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun*. (Thesis S2). Universitas Negeri Jambi.
- Agussalim, M., 2010, *Metodologi Penelitian*, Padang : Ekasakti Press.
- Agussalim, M., 2013, *Statistik*, Padang: Ekasakti Press.
- Assidiqi, Bahrin. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2012* (Skripsi S1). Universitas Negeri Yogyakarta
- Bakti, Yola Yunicha. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 – 2014* (Skripsi S1). Universitas Ekasakti.
- Bastian, I., 2005, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Ananda, chitra. 2010. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Kabupaten Pandeglang Tahun 2009-2011* (Skripsi SI). Universitas Gunadarma.

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks. Jakarta
- Djarwanto, PS. *Pokok – pokok Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedelapan. BPF. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, Ardi. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Tesis. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Kaya, Masita. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten Gorontalo*. Skripsi S1. Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Munawir, S. 2001. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty
- Saputra, Sandy Chandra. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014* (Jurnal). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yuliana. 2013. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau dari Rasio Keuangan Studi Kasus Kab. Sragen 2010 – 2012* (Jurnal). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Inova Fitri, 2013, Anggaran Biaya Sebagai Salah Satu Faktor Penentu Laba Pada PT. Jamsostek (persero) Cabang Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti Padang*.
- Nitha Deashinta, 2015, Analisis Anggaran dan Realisasi Biaya Proyek Pembangunan Kantor Dinas pada CV. Banyu Bening di Samarinda. *Jurnal Penganggaran, 11(1), 55-62*.
- Nani Nurani, 2012, Peranan Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada PT. Waskita Karya Cabang Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti Padang*.
- Ichsan. 2015. Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Penjualan Pada PT. AyamQu Padang. Skripsi. Universitas Ekasakti Padang
- Widya, Pratiwi. 2012. Analisis Anggaran Proyek Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Perusahaan Kontraktor Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar